

SKRIPSI

**PERANAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM MELAKUKAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UNTUK
MEMPERTAHANKAN OPINI AUDIT
WAJAR TANPA PENGECUALIAN**

(Studi Pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Majene)



MUH. NURUL HUDA RUSDI

C02 16 519

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PERANAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM MELAKUKAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UNTUK
MEMPERTAHANKAN OPINI AUDIT
WAJAR TANPA PENGECUALIAN
(Studi Pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Majene)



MUH. NURUL HUDA RUSDI
C02 16 519

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelara Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat.

Telah disetujui Oleh :

Pembimbing I

Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak., CAR
Nip. 19790829 200604 1 007

Pembimbing II

Riana Anggraeny Ridwan, SE., M.Si
Nip. 19940814 202203 2 019

Menyetujui
Koordinator Program Studi



Nuraeni M., S.Pd., M.Ak
Nip. 19831203 201903 2 006

**PERANAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM MELAKUKAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UNTUK
MEMPERTAHANKAN OPINI AUDIT
WAJAR TANPA PENGECUALIAN
(Studi Pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Majene)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**MUH. NURUL HUDA RUSDI
C02 16 519**

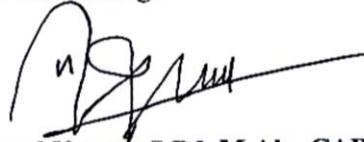
Telah diuji dan diterima Panitia Ujian
Pada Tanggal 06 Juni 2023 dan dinyatakan lulus.

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Muhammad Yusran, S.P., M.Ak., CAR	Ketua	1) 
2. Riana Anggraeny Ridwan, SE., M.Si.	Sekretaris	2) 
3. Jumardi, SE., M.Si.	Anggota	3) 
4. Eni Novitasari SE., M.Si	Anggota	4) 
5. Muhammad Mukhram, S.Pd., M.Ak	Anggota	5) 

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak., CAR
Nip. 19790829 200604 1 007

Pembimbing II



Riana Anggraeny Ridwan, SE., M.Si
Nip. 19940814 202203 2 019

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB
NIP: 19670325 199403 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Nurul Huda Rusdi

Nim : C02 16 519

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Peranan Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Untuk Mempertahankan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (Studi Pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Majene)”** adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Bila dikemudian hari pernyataan saya tidak terbukti benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan saya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Majene, 22 Mei 2023

buat pernyataan,

Muh. Nurul Huda Rusdi
Nim. C02 16 519

ABSTRAK

MUH. NURUL HUDA RUSDI, 2023. Peranan Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Untuk Mempertahankan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Majene). (Dibimbing oleh **Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak., CAR** Selaku Pembimbing I dan **Riana Anggraeny Ridwan, SE., M.Si** Selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah peranan Inspektorat berpengaruh dalam melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh auditor di Inspektorat Kabupaten Majene. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 31 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) peranan Inspektorat dalam melakukan pembinaan berpengaruh signifikan dalam mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian. (2) Peranan Inspektorat dalam melakukan pengawasan berpengaruh signifikan dalam mempertahankan opini audit wajar tanpa. (3) Peranan Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berpengaruh secara simultan dalam mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian dengan. (4) Nilai koefisien determinasi (R^2) 0,380 yang menunjukkan bahwa perubahan variabel dependen 38,0% sedangkan sisanya 62,0% diterangkan oleh faktor lain diluar model regresi yang dianalisis.

Kata Kunci : Pembinaan, Pengawasan, Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian

ABSTRACT

MUH. NURUL HUDA RUSDI, 2023. *Thesis Title The Role Of The Inspectorate In Exercising And Supervision To Keep The Audit Opinion Fair Without Exceptions (Case Study At The Majene Regency Inspectorate Office). (Supervised by Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak., CAR as Supervisor I and Riana Anggraeny Ridwan, SE., M.Si as Supervisor II).*

The purpose of this study was to examine the role of the Inspectorate in providing guidance and supervision to maintain an unqualified audit opinion. The types of data used are primary data and secondary data. This research is a quantitative approach. The research data were obtained from questionnaires filled out by auditors at the Majene Regency Inspectorate. The sample used in this study was 31 respondents. The data analysis technique used is multiple regression analysis. The results of this study indicate that (1) the role of the Inspectorate in conducting guidance has a significant effect in maintaining an unqualified audit opinion. (2) the role of the Inspectorate in conducting supervision has a significant effect on maintaining an unqualified audit opinion. (3) The role of the Inspectorate in conducting guidance and supervision simultaneously affects maintaining an unqualified audit opinion. (4) The coefficient of determination (R^2) value is 0.380 which indicates that the change in the dependent variable is 38.0% while the remaining 62.0% is explained by other factors outside the analyzed regression model.

Keywords: *Coaching, Supervision, Unqualified Audit Opinion*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan laporan keuangan untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK akan memberikan opininya atas laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu opini yang ingin dicapai oleh setiap pemerintah adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian menjadi tolak ukur pencapaian yang baik bagi pemerintah daerah dan juga menjadi tuntutan reformasi birokrasi, hal ini menjadi salah satu indikator kinerja instansi pemerintah yang sudah sesuai dengan standar serta mencerminkan akuntabilitas yang baik (Nurabiah, 2016). Presiden Jokowi (kompas, 2017) mengatakan bahwa opini WTP bukan merupakan prestasi, tapi kewajiban instansi pemerintah sebagai pengguna keuangan Negara. Dalam hal ini, upaya mencapai WTP serta mempertahankannya menjadi tolak ukur kinerja pengelolaan anggaran pemerintah yang harus dilakukan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan kinerja pemerintah daerah yang harus dipertanggung jawabkan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat. Untuk menunjang kredibilitas publik terhadap LKPD yang telah selesai dan siap untuk diterbitkan, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Badan yang ditunjuk langsung oleh Presiden, melaksanakan sebuah audit untuk menilai kewajaran LKPD tersebut (Indrarti, 2014). BPK

melakukan pemeriksaan dari segi kesesuaian standar akuntansi, efektifitas dari pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), kecukupan pengungkapan serta ketaatan terhadap perundang-undangan. Pentingnya suatu pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal agar keempat unsur diatas dapat terlaksana dengan baik sebelum dinilai oleh BPK.

Pembinaan dan Pengawasan menjadi fungsi dan tugas pokok Inspektorat, selain itu Inspektorat bertugas mengawasi keempat unsur diatas agar dapat berjalan dengan baik. Untuk mencapai/mempertahankan WTP, keterlibatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Daerah menjadi sangat penting. Inspektorat memiliki peran penting agar pada saat dilakukan pengkajian ulang terhadap laporan keuangan tidak lagi ditemukan kesalahan penganggaran, penyajian data yang tidak sesuai dengan kondisi nyata, dan sebagainya. Dari hasil review Inspektorat daerah tersebut menjadi acuan bagi BPK sebelum melaksanakan audit, sehingga Inspektorat daerah mempunyai peran penting dalam upaya pencapaian atau mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Data BPK RI pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Majene masih diberikan predikat Opini Wajar Dengan Pengecualian hal tersebut dikarenakan masih adanya permasalahan yang ditemukan oleh BPK dari segi Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Temuan dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA. 2014 diantaranya yaitu sistem pencatatan dan pelaporan persediaan yang belum memadai,

pelaksanaan kegiatan swakelola pada Dinas Pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2014 pada dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum dan dinas perumahan, pemukiman, dan kebersihan yang belum dikenakan denda keterlambatan, dan pelaksanaan pekerjaan pada dinas kesehatan dan dinas perumahan, pemukiman dan kebersihan yang tidak sesuai kontrak (Pusat Kajian AKN SEKJEN dan BK DPR RI, 2018).

Dari hasil temuan dan permasalahan pada WDP tersebut, kurangnya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan tersebut. Dari permasalahan-permasalahan tersebut peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Majene dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ke perangkat daerah menjadi sangat penting agar terciptanya pelaksanaan yang baik dari unsur-unsur tersebut.

Upaya pembenahan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene sejak tahun 2014 tersebut, hingga upaya perbaikan LKPD pada tahun 2015 semakin baik dan menghasilkan predikat opini WTP sampai pada tahun 2021. Dari data BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2021 tersebut dalam pemberian opini WTP masih ada beberapa permasalahan yang harus diperhatikan, antara lain seperti perubahan penjabaran APBD TA 2021 tidak sesuai ketentuan, kesalahan penganggaran, setoran penerimaan pajak dan retribusi tidak sesuai ketentuan, biaya dan pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran atas kurang volume pembayaran fisik,

denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik belum dikenakan, pengelolaan BMD tidak memadai, dan pengelolaan PBB-P2 belum memadai.

Meski masih memiliki beberapa catatan, namun setidaknya penyajian LKPD Pemerintah Kabupaten Majene semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian Pemerintah Kabupaten Majene yang berhasil meraih predikat opini WTP secara 6 tahun berturut-turut.

Atas dasar hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Untuk Mempertahankan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah Peranan Inspektorat berpengaruh signifikan dalam melakukan Pembinaan untuk mempertahankan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian?
2. Apakah Peranan Inspektorat berpengaruh signifikan dalam melakukan Pengawasan untuk mempertahankan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian?
3. Apakah Peranan Inspektorat berpengaruh secara simultan dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan untuk mempertahankan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peranan Inspektorat berpengaruh signifikan dalam melakukan Pembinaan untuk mempertahankan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian?
2. Untuk mengetahui Peranan Inspektorat berpengaruh signifikan dalam melakukan Pengawasan untuk mempertahankan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian?
3. Untuk mengetahui Peranan Inspektorat berpengaruh secara simultan dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan untuk mempertahankan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbang saran dalam perkembangan ilmu pemerintahan pada umumnya dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan bagi Inspektorat Daerah dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan agar dapat meningkatkan maupun mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Inspektorat Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Tugas, Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten/Kota adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (pasal 49, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). Dalam melakukan pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan lima macam bentuk pengawasan, diantaranya yaitu audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Pengendalian intern merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP terdiri dari

lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan pengendalian intern yang mana kesemua unsur tersebut harus dipenuhi agar menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan akan berdampak baik pada perolehan opini.

Dalam meningkatkan peranannya, perlu diketahui seberapa besar tingkat kapabilitas dari Inspektorat yang bersangkutan. menurut Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER1633/K/JF/2011 tanggal 27 Desember 2011 Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), bahwa Kapabilitas APIP yang di dalamnya termasuk Inspektorat Kabupaten/Kota adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu, kapasitas, kewenangan, kompetensi SDM APIP. Tiga unsur tersebut harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

2.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).

SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP Nomor 60 Tahun 2008). Dengan tujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam Mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 4, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan,
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 11, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu;

1. Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
2. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan,
 - b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

2.1.2.2 Unsur- Unsur SPIP

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 dalam (Maya Sari, 2015), SPIP terdiri dari lima unsur dan 25 (dua puluh lima) sub unsur, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan Integritas dan Etika
- b. Komitmen terhadap Kompetensi
- c. Kepemimpinan yang Kondusif
- d. Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
- e. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
- f. Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
- g. Peran APIP yang Efektif
- h. Hubungan Kerja yang Baik

2. Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Dalam penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah terlebih dahulu menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko terdiri dari:

- a. Identifikasi Risiko, dengan menggunakan berbagai metodologi yang sesuai untuk tujuan IP dan tujuan pada tingkat kegiatan secara komprehensif, mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal, serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko yang dihadapi instansi pemerintah.
- b. Analisis Risiko, dilaksanakan untuk menentukan dampak risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan IP menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

3. Kegiatan Pengendalian

Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian ditetapkan untuk membantu memastikan bahwa arahan pimpinan IP dilaksanakan dan membantu memastikan tindakan yang perlu, telah dilakukan untuk meminimalkan risiko dalam mencapai tujuan. Kegiatan pengendalian terdiri atas :

- a. Review atas Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Pembinaan Sumber Daya Manusia
- c. Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
- d. Pengendalian Fisik atas Aset
- e. Penetapan & Review Indikator & Ukuran Kinerja
- f. Pemisahan Fungsi
- g. Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting

- h. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
- i. Pembatasan Akses atas Sumber Daya
- j. Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
- k. Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Pimpinan yang ada pada Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi terdiri atas :

- a. Sarana Komunikasi
- b. Sistem Informasi

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan Pengendalian Intern yaitu proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

- a. Pemantauan Berkelanjutan
- b. Evaluasi Terpisah dan Tindak Lanjut.

2.1.2.3 Manfaat SPIP

Menurut Mulyadi (2014) adapun manfaat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan jaminan bahwa operasi/kegiatan Instansi menjadi efektif, efisien dan ekonomis,
2. Mendeteksi terjadinya kesalahan (*Mismanagement*) dan fraud dalam pelaksanaan aktivitas organisasi,
3. Membantu pengamanan asset terkait terjadinya fraud, pemborosan, dan salah penggunaan yang tidak sesuai tujuan,
4. Memberikan keyakinan atas keandalan laporan keuangan,
5. Memberi keyakinan akan ketaatan terhadap peraturan perundangan,
6. Membantu manajemen merespon perubahan.

2.1.2.4 Keterbatasan SPIP

Adapun keterbatasan SPIP menurut Bastian (2015) diantaranya sebagai berikut :

1. Praktek kolusi sehingga Sistem Pengendalian Intern tidak efektif;
2. Pimpinan Instansi Pemerintah mengabaikan pentingnya Sistem Pengendalian Intern;
3. Human error; pengambilan keputusan yg tidak tepat mengakibatkan kegagalan pengendalian (kegagalan personal).

2.1.2.5 Hambatan Penerapan SPIP

Menurut Utama (2020) terdapat beberapa hambatan penerapan SPIP diantaranya :

1. Persepsi pimpinan Instansi Pemerintah dan auditor atau evaluator terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern tidak mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai;
2. Budaya sungkan yang masih kental;
3. Kualifikasi SDM yang kurang memadai.

2.1.2.6 Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan SPIP

Adapun faktor yang menyebabkan keberhasilan SPIP menurut Utama (2020) diantaranya :

1. Terdapat kesadaran dan kepedulian di seluruh tingkatan jajaran manajemen dan staff,
2. Terdapat kesamaan persepsi atas tanggungjawab efektivitas SPIP,
3. Terdapat SPIP yang sesuai dengan kebutuhan organisasi,
4. Pengembangan secara berkesinambungan.

2.1.3 Opini Audit

2.1.3.1 Pengertian Opini Audit

Menurut Halim (2015), yang dimaksud dengan opini audit adalah “Opini audit merupakan kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan wajar dibidang auditing apabila bebas dari keraguan-keraguan dan ketidakjujuran (*Free From Bias And Dishonesty*), dan lengkap

informasinya (*Full Disclosure*). Hal ini tentu saja masih dibatasi oleh konsep materialitas”.

Sedangkan menurut Mulyadi (2019) pengertian opini audit yaitu: “Opini audit merupakan opini yang diberikan auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit”.

2.1.3.2 Jenis-jenis Opini

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jenis-jenis opini yang diberikan oleh BPK RI yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan yang diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah tersebut dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Adapun indikator yang terdapat pada opini wajar tanpa pengecualian yaitu :

- a. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati.
 - b. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja.
 - c. Laporan keuangan yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan.
 - d. Tidak terdapat ketidak pastian yang cukup berarti (*No Material Uncertainties*) mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan.
2. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*) Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Adapun indikator opini wajar dengan pengecualian yaitu :

- a. Bukti kurang cukup
- b. Adanya pembatasan ruang lingkup
- c. Terdapat penyimpangan dalam prinsip yang berlaku umum

3. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*) Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah daerah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Adapun indikator opini tidak wajar yaitu :

- a. Tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum
 - b. Kebenaran laporan keuangan diragukan
4. Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*) Adalah pendapat yang menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti pemeriksaan atau audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Opini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah daerah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Adapun indikator opini menolak/tidak memberikan pendapat yaitu :

- a. Laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai standar pemeriksaan.
- b. Informasi keuangan tidak dapat digunakan.

2.1.4 Audit Sektor Publik

Pengertian Audit Sektor Publik adalah Audit Sektor Publik adalah jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka dani (Indra Bastian, 2016). Audit Sektor Publik adalah Audit Sektor Publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan (I Gusti Agung Rai, 2015).

Audit Sektor Publik di Indonesia dikenal sebagai Audit Keuangan Negara. Audit Keuangan Negara ini diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Undang-undang ini merupakan pengganti ketentuan warisan Belanda, yaitu *Indische Comptabiliteitswet* (ICW) dan *Instructie en verdere bepalingen voor de Algemene Rekenkamer* (IAR), yang mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh Pemerintah. Audit Sektor Publik dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi berterima umum, Peraturan Perundang-Undangan Dan Pengendalian Intern serta kegiatan operasi entitas sektor publik dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan efektif. Audit tetap perlu dilakukan dalam keterbatasan yang ada agar tercipta akuntabilitas publik yang lebih transparan dan akuntabel.

2.2 Tinjauan Empirik

2.2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini adalah landasan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian agar peneliti mampu memperbanyak ide dan konsep yang dipakai pada kajian penelitian yang dilakukan. Peneliti mengangkat beberapa hasil penelitian acuan dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut daftar penelitian terdahulu yang berupa beberapa jurnal terkait penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fikriania Nurkhafifah Iswanto, Ranti Rufaedah, Jurnal Akuntansi (2019)	Peranan Inspektorat Daerah dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan SPIP Untuk Meningkatkan Perolehan Opini Audit	Hasil dari penelitian ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki peran yang signifikan terhadap peningkatan opini audit dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perangkat daerah.	Mempunyai persamaan variabel Peranan Inspektorat Daerah dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan SPIP	Penelitian ini berfokus dalam hal mempertahankan perolehan opini audit sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada peningkatan perolehan opini audit
2	Angel Wulandari Manialup, Grace B,	Peran Inspektorat dalam Pelaksanaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Inspektorat dalam	Sama-sama menganalisis peran Inspektorat	Variabel dalam penelitian ini menggunakan pembinaan dan

	Nanggoi, dan Jenny Morasa, Jurnal Riset dan Auditing (2017)	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud	pelaksanaan SPIP di Kab.Kepulauan Talaud yaitu dalam hal kepemimpinan, pengawasan intern, konsultan dan penjamin mutu. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala penerapan SPIP di Kab. Talaud.	dalam pelaksanaan SPIP	pengawasan untuk mempertahankan perolehan opini audit sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3	Fitrianti P., Jullie J. Sondakh, dan Jenny Morasa Jurnal Riset dan Auditing (2017)	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Kabupaten Gorontalo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan SPIP pada Kab. Gorontalo telah sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Namun, belum tercapainya target level 3 maturitas SPIP di Kab. Gorontalo mengindikasikan bahwa penerapan SPIP masih mengalami banyak kendala	Sama-sama meneliti mengenai penerapan SPIP	Penelitian ini berfokus pada Peranan Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan SPIP untuk mempertahankan opini audit WTP sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

4	Maya Sari, Jurnal Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (2015)	Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara	Hasil Pengendalian intern pemerintah dianggap baik. BPKP sebagai pembinaSPIP telah melaksanakan fungsinya dengan memadai, tetapi belum efektif dilihat capaian yang belum semuamencapai target, BPKP hanya sebagai pembina SPIP bukan sebagai pelaksana,yang menjadi pelaksana adalah pemerintah kabupaten/kota.	Mempunyai persamaan variabel penelitian yaitu SPIP	Penelitian ini lebih kearah peranan Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan SPIP untuk mempertahankan opini audit WTP sedangkan penelitian sebelumnya Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
---	---	---	--	--	--

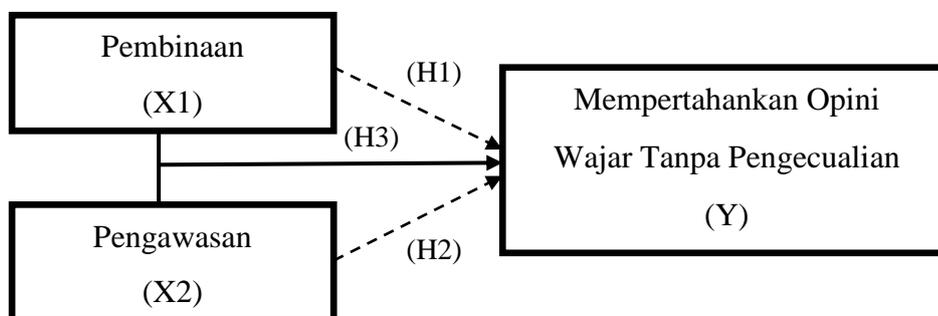
2.3 Kerangka Konseptual

Pembinaan sendiri pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dengan tanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, penumbuhan, membimbing, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Dengan terdapat adanya Pembinaan yang baik dari segi pengarahan, konsultasi, serta pelatihan keterampilan dapat memiliki dampak yang positif dalam peningkatan maupun mempertahankan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian.

Pengawasan adalah kegiatan sistematis yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah lembaga untuk memantau atau mengawasi aktivitas atau perilaku orang lain, proses, atau kegiatan organisasi guna memastikan bahwa semua yang dilakukan telah sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Baik atau buruknya suatu pengawasan yang dilakukan dapat menentukan perolehan opini audit yang akan diperoleh.

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Pengendalian intern merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdiri dari lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan pengendalian intern dimana jika kesemua unsur tersebut dapat dipenuhi maka dapat menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akan berdampak baik pada perolehan opini. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika Pembinaan dan Pengawasan dapat dilakukan dengan baik oleh Inspektorat Daerah maka semakin baik perolehan opini audit yang dihasilkan.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan :

- - - - -> : Pengaruh Secara Parsial
- > : Pengaruh Secara Simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dibuat dalam kalimat pertanyaan ataupun pernyataan.

Berikut hipotesis yang diajukan dalam penelitian:

H1: Peranan Inspektorat dalam melakukan Pembinaan berpengaruh signifikan untuk mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian

H2: Peranan Inspektorat dalam melakukan Pengawasan berpengaruh signifikan dalam mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian

H3: Peranan Inspektorat dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan berpengaruh signifikan dalam mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai peranan Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian dengan menggunakan SPSS v.21 sebagai berikut :

1. Nilai koefisien dari variabel pembinaan sebesar 0,641 dan tingkat signifikansi 0,005 ($< 0,05$). Dengan demikian H1 diterima yang artinya terdapat pengaruh signifikan pembinaan (X_1) secara parsial terhadap mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian (Y).
2. Nilai koefisien pengawasan sebesar 0,600 dengan tingkat signifikansi 0,004 ($< 0,05$). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap perolehan opini audit wajar tanpa pengecualian (Y). Dengan demikian H2 diterima yang artinya terdapat pengaruh variabel pengawasan terhadap mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian.
3. Nilai f_{hitung} sebesar 6,994 dengan probabilitas 0,003 yang nilainya dibawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian H3 diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan pembinaan (X_1) dan pengawasan (X_2) terhadap mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian (Y).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Keterbatasan pada penelitian yang dilakukan ialah masih terdapat beberapa faktor lain yang tidak diteliti pada penulis dan dapat mempengaruhi dalam mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian.
2. Kesibukan dari seorang auditor yang banyak melakukan penugasan/pemeriksaan membuat pengambilan data kuesioner memerlukan waktu yang cukup lama.

5.3 Saran

Berikut saran yang diberikan oleh peneliti :

1. Inspektorat perlu meningkatkan komitmen dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan guna mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya peran Inspektorat dalam mencapai tujuan tersebut.
2. Inspektorat perlu melakukan pengembangan kompetensi dan keterampilan pegawai yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan. Pelatihan reguler, workshop, dan program pengembangan profesional dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keahlian mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2014). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ardianto. (2014). *Metode Penelitian untuk Public Relations. Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bastian. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah. (2011). *Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP*. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2014). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2*. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Barat. (2021). *Siaran Pers*. Mamuju.
- Fitrianti P., Jullie J. Sondakh, dan Jenny Morasa. (2017). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Kabupaten Gorontalo. *Jurnal. Universitas Sam Ratulangi*.
- Harisman. (2021). *Pengaruh Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Halim, Abdul. (2015). *Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan Jilid 1*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Indrarti, Nuansa Mega Okky. (2014). Hubungan Antara Opini Audit Pada Laporan Keuangan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal. Universitas Riau*.
- Maya Sari. (2015). Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Mulyadi. (2019). *Auditing. Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2014). *Sistem Pengendalian Internal*. Jakarta : Salemba Empat.
- Notoatmodjo. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nurabiah. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3 (1), 67-100.
- Nugroho. (2014). *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS.* Yogyakarta : Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tersedia di

:http://www.bpkp.go.id/publik/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008_SPIP.pdf .

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pusat Kajian AKN. (2018). Problematika Akuntabilitas Pengelolaan Dana Transfer Pusat Ke Daerah Di Provinsi Sulawesi Barat, tersedia di
:<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://berkas.dpr.go.id/puskajiakn/analisis-ringkas-cepat/publik-file/analisis-ringkas-cepat-publik-11.pdf>.

Sinambela. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Graha ilmu.

Siyoto S. Sodik A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Afabeta.

Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.